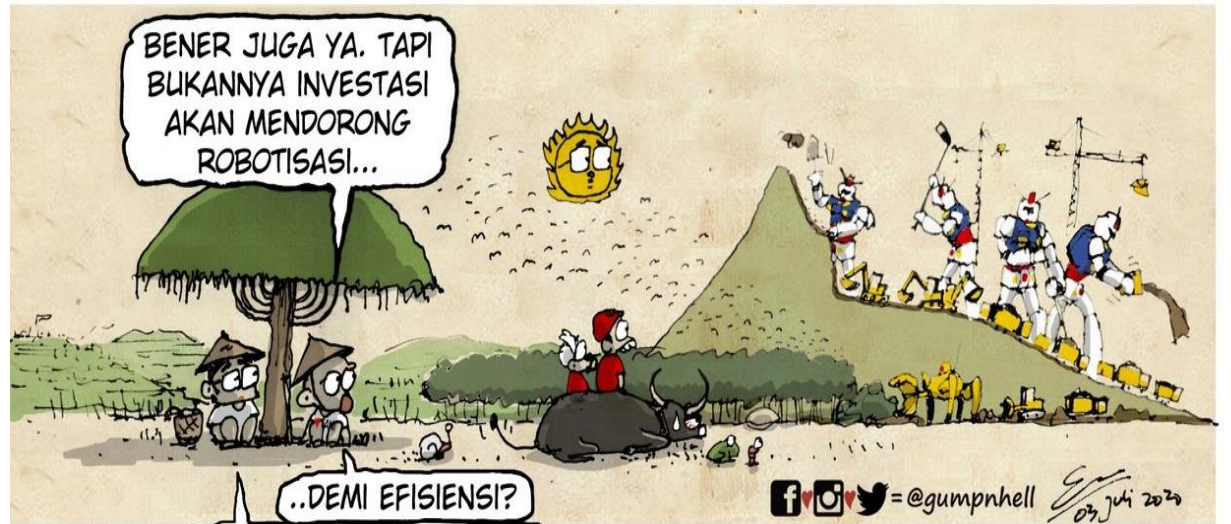


Omnibus Law RUU Cipta Kerja: State Capture dan Sentralisasi Kekuasaan dari Perspektif Sumber Daya Alam

Nur Hidayati
Direkur Eksekutif Nasional WALHI

Disampaikan pada
Diskusi Seputar Korupsi PUKAT UGM
13 Juli 2020





#AtasiVirusCabutOmnibus

Sumber: Instagram @gumpnhell

Permasalahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

- Secara proses sangat tertutup dan tidak ada keterbukaan informasi. Partisipasi dibatasi hanya sebatas sosialisasi di akhir, yang tidak akan memberi pengaruh apa pun terhadap keberadaan RUU ini.
- Secara substantif, ada kesesatan berpikir di dalam keseluruhan isi RUU ini yang memandang bahwa kurangnya investasi (asing) ke Indonesia adalah akibat problem institusional, padahal problemnya adalah struktural, yaitu *state capture*.
- Prinsip-prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan SDA-LH dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja.
- Ada upaya “*misleading*” dengan judul RUU ini, “Cipta Kerja” seolah-olah akan menciptakan (lapangan) kerja, padahal ketika dianalisa penciptaan kerja dalam RUU ini justru dengan cara, antara lain, menghilangkan kerja-kerja rakyat yang sudah ada.
- Fakta-fakta menunjukkan bahwa kenaikan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berarti kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Jadi mengapa DPR-RI dan pemerintah ngotot dg Omnibus Law Cipta Kerja?



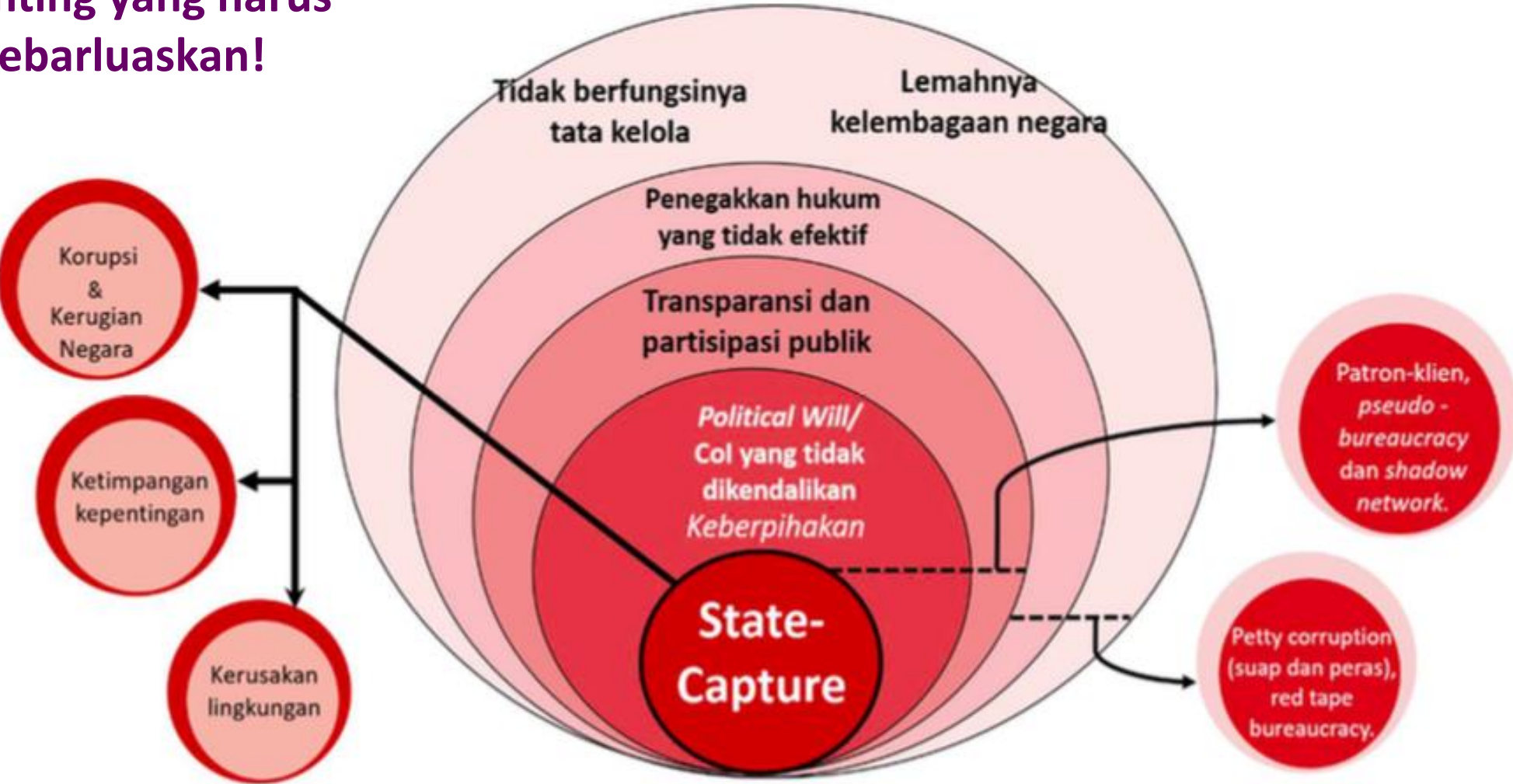
- Kebanggaan semu pertumbuhan ekonomi atau “*economic growth*” (dalam hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDB/GDP) dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara, sehingga sering juga menjadi tujuan politik rezim/penguasa – Presiden bangga dan dianggap berhasil jika pertumbuhan ekonomi negara tinggi.
- Pertumbuhan ekonomi esensinya adalah likuidasi alam. Alam dilihat sebagai sumber daya yang habis dalam sistem produksi yang linear → input – output – limbah/waste. Konsekuensi: pencemaran LH dan pengurasan SDA.
- Padahal, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berarti kesejahteraan dan pemerataan bagi rakyat kebanyakan. Menurut Oxfam (2017), 1% orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 49% kekayaan seluruh orang Indonesia. Empat (4) orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 100.000.000 orang termiskin. . 60% daratan di Indonesia dikuasai oleh korporasi melalui perizinan dan konsesi. [WALHI 2018].
- Strategi pembangunan ekonomi Indonesia adalah ekonomi *trickle down* yang percaya pemodal besar sbg *prime mover* –nampaknya hingga saat ini masih belaku. Efisiensi, produktifitas – *economy of scale* (semakin besar, semakin efisien/murah), kemudian menjadi turunannya. Kontrol SDA sepenuhnya di tangan negara/pemerintah menjadi konsekuensinya.



- Kronisme dan oligarki menjadi warisan orde baru yang masih eksis hingga hari ini.
- Korupsi SDA merupakan masalah kronis yang berakar sejak lama → masa orba dg watak 'developmentalisme' yg ditandai dengan kapitalisme-kroni, dan sentralisme kekuasaan di tangan pemerintah pusat. [Kartodiharjo, 2006]
- Dalam perjalanannya, GNPSDA-KPK menemukan bahawa korupsi SDA yang terjadi saat ini lebih dekat dengan pengertian korupsi struktural daripada jenis korupsi institusional (yg mendasarkannya pada kegagalan sistem regulasi, administrasi, dan birokrasi) [Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA KPK, 2018].



Diagram yang sangat penting yang harus disebarluaskan!



Gambar 4
Ragam Korupsi dari Akar Masalah Terjadinya *State-Capture*

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

JABATAN	2004-2017
Anggota dewan	144
Menteri/ Kepala lembaga	25
Duta Besar	4
Komisioner Lembaga Negara	7
Gubernur	18
Bupati	71
Pejabat pemerintah	175
Hakim	17
Jaksa	7
Polisi	2
Pengacara	6
Swasta	184
Lainnya	78
Korporasi	1
Total	739

TIPOLOGI KASUS	2004-2017	%
Penyuapan	396	58
Pengadaan Barang/Jasa	171	25
Penyalahgunaan Anggaran	46	7
TPPU	25	4
Perizinan	22	3
Pungutan	21	3
Merintang Proses KPK	7	1
Total	688	100



Lebih dari 12 Kasus Korupsi Sektor SDA

khususnya di sektor kehutanan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.



Lebih dari 24 Pejabat Diproses Hukum

oleh KPK terkait kasus korupsi sektor kehutanan. Dalam satu kasus Azmun Ja'far kerugian negara mencapai 1.2 triliun rupiah.

BERITA UTAMA

Pebisnis Tempati Hampir Sepuluh Parlemen

Sebanyak 262 anggota DPR terafiliasi atau terlibat dalam 1.016 perusahaan.

EDISI, 2 OKTOBER 2019



Ketua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama Anggota Fraksi PDIP DPR RI di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. TEMPO/M Taufan

Kondisi saat ini

- Oligarki (ekonomi-politik): 45,5% anggota DPR-RI saat ini adalah pebisnis, atau 262 anggota DPR-RI terafiliasi atau terlibat dalam 1016 perusahaan.
- Kembalinya semangat orde baru dalam berbagai produk perundangan (UU Minerba, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Pemilu, dll) – resentralisasi, rekonsentrasi power dan sumber daya negara untuk oligarki



Terima Kasih

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Friends of the Earth Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Mampang, Jakarta Selatan
Tlp. 021-79193363
Fax. 021-7941673
www.walhi.or.id

